

Analisis Kesiapan Desa dalam Menerapkan *E Government* (Studi Kasus Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)

Rimawati Ningtias¹, Nieke Rudyanty Winanda²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Darul 'Ulum

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Darul 'Ulum

(email: rimawatiputri1305@gmail.com)

Abstrak

E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dan dalam penerapannya pemerintah desa maupun masyarakat banyak yang belum siap beranjak kearah e-government. Maka dengan adanya data pendukung dari penelitian terdahulu, peneliti mencoba untuk menganalisis kesiapan desa Pagerluyung dalam bertransformasi ke era digital. Guna mengetahui seberapa siap pemerintah desa pagerluyung dapat bertransformasi kearah *E-government*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa siap pemerintah desa pagerluyung untuk menerapkan *E-government* dan seberapa siap masyarakat dalam mengikuti transformasi pelayanan digital. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa Dari pihak pemerintah desa sudah memahami seberapa penting penerapan *e-government* ini. Sementara Masyarakat cenderung masih takut atau belum siap dalam penerapan e-government karena berbagai alasan. Alasan pertama yaitu lebih senang dengan pelayanan tatap muka karena lebih efisien. Efisien yang dimaksud adalah jika terdapat suatu hal yang tidak diketahui bisa langsung ditanyakan ke pihak terkait. Juga pelayanan tatap muka masih sangat diperlukan untuk kategori umur lansia yang gagap teknologi. Selain itu juga terdapat masyarakat yang sudah siap dengan adanya *e-government* di desa Pagerluyung.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; E-government; Kesiapan Desa

Abstract

E-government is the use of information technology by the government to provide information and services for its citizens, business affairs, and other matters related to government. And in its implementation, many village governments and communities are not ready to move towards e-government. So with this supporting data, researchers tried to analyze the readiness of Pagerluyung village in transforming into the digital era. In order to find out how ready the village government is to transform towards E-government. This study also aims to find out how ready the village government is to implement E-government and how ready the community is to follow the transformation of digital services. The results on the ground show that the village government already understands how important the implementation of e-government is. Meanwhile, people tend to still be afraid or not ready in the implementation of e-government for various reasons. The first reason is to be happier with face-to-face service because it is more efficient. Efficient what is meant is that if there is something unknown, it can be directly asked

to the relevant party. Also face-to-face services are still indispensable for the age category of the elderly who stutter with technology. In addition, there are also people who are ready for the existence of e-government in Pagerluyung village.

Keyword: Village Government; E-government; Village Readiness

Pendahuluan

Indonesia saat ini sudah memasuki era reformasi setelah runtuhnya orde baru, yang ditandai dengan munculnya reformasi telekomunikasi. Setelah diputuskannya monopoli pemerintah dalam manajemen komunikasi publik sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Sejak diputuskannya monopoli pemerintahan dalam manajemen komunikasi, perkembangan digitalisasi juga sangat pesat yang ditandai dengan tumbuhnya ahli telekomunikasi yang bersaing di tingkat domestik Indonesia. (peneliti, 2021)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dalam kemajuan dibidang teknologi komunikasi dan informasi. Pada saat ini yang berkembang begitu pesat, dapat dikatakan pada suatu bangsa yang maju dapat dilihat dalam seberapa jauh bangsa itu menguasai bidang tersebut. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global maka tidak bisa dipungkiri kita harus terlibat dalam perkembangan dalam menguasai IPTEK, khususnya untuk kepentingan bangsa sendiri. Untuk mencapai keinginan tersebut, pemerintah harus memaksukan dalam tujuan dan pembangunan nasional yaitu sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Perkembangan teknologi membuat pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara kebijakan publik atau pembuat kebijakan publik tetapi juga harus bisa menyediakan layanan publik yang dapat memudahkan masyarakat untuk bisa menggunakan pelayanan publik dengan nyaman dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat (Noor Asyikin et al. 2015). Sebelum menggunakan teknologi dibutuhkan perencanaan dan optimalisasi yang sangat penting, sebab didalam perencanaan terdapat persiapan untuk bisa mengoperasikan komputer seperti pembuatan web atau perangkat keras dan lunak lainnya. Dalam optimalisasi juga diperlukan keahlian untuk bisa memanfaatkan komputer agar bisa tepat guna dan dapat menunjang pelayanan publik di pemerintahan desa.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diberbagai sektor telah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan bentuk pelayanan publik yang dilakukan melalui *E-government*. Pelayanan pemerintah yang birokratis melalui pemanfaatan *e-government* menjadi lebih cepat pada kepuasan pengguna (Watrianthos et al., 2017). *E-government* menawarkan pelayanan publik dapat diakses secara 24 jam, kapanpun dan dimanapun berada. *E-government* juga memudahkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face to face sehingga pelayanan lebih efisien. Mengetahui akan besarnya manfaat e-government pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan e-government dalam bentuk instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 (Hartono et al., 2010).

Untuk menerapkan sistem e-government, proses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di desa dibutuhkan perencanaan yang matang dan keseluruhan, maka dari itu penerapan teknologi informasi dapat berjalan sesuai semestinya dengan menyelesaikan masalah yang muncul pada saat pelaksanaannya. Tanpa perencanaan yang baik kerap kali penerapan teknologi informasi akan menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan hasil yang diharapkan.

Menyadari akan besarnya manfaat teknologi informasi pemerintah pada awal tahun 2022 Pemkab Mojokerto telah meluncurkan beberapa aplikasi pelayanan publik yaitu E-SPPD, E-Agenda dan Mal pelayanan publik digital. (fauzan, 2022) Ada juga aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2021 yaitu *Covid Information System (CIS)*, aplikasi pendukung layanan administrasi Pemkab Mojokerto (E-office), Dengar aspirasi masyarakat Mojokerto (Damar Mojo). (prihatin, 2021) Tujuan pemerintah kabupaten Mojokerto membuat aplikasi tersebut karena untuk membangun jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai solusi untuk mengatasi hambatan keterbatasan akses antar wilayah. Ide pembangunan jaringan TIK dimulai sejak tahun 2021. Bersamaan dengan pembangunan jaringan online, pemerintah kabupaten Mojokerto mulai membangun sistem aplikasi *E-government* agar bisa meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan didukung dengan data yang cepat dan tepat.

Dalam implementasi pelayanan publik melalui *E-government* lebih banyak digunakan masyarakat diperkotaan daripada dipedesaan, hal ini dikarenakan perkembangan TIK di desa kurang efektif, dapat dilihat kurangnya sumber daya manusia yang bisa menguasai komputer serta minimnya fasilitas komputer yang tersedia didesa. Hal ini bisa dibuktikan masih banyak warga jika ingin mengurus surat penting di desa yang menanganinya hanya orang yang muda dan dianggap bisa mengoperasikannya (Subhan & Pratama, 2019).

E-government diharapkan menjadi terobosan baru bagi pemerintah untuk mempermudah proses pelayanan publik pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diharapkan bagi masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. *E-government* dapat dikatakan sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah yang dapat menyalurkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, di berbagai bidang misal bidang bisnis maupun dengan lembaga pemerintah lainnya (Napitupulu, 2015).

Dengan menggunakan sistem online, banyak manfaat yang bisa didapat. Dengan sistem online ini dapat menghemat biaya, karena proses pengiriman data dapat dilakukan secara online. Sistem ini dapat digunakan untuk mengakses internet dengan akses download yang lebih cepat. Melihat kondisi infrastruktur yang begitu memadai dan berjalan dengan baik, adanya *E-government* yang berjalan perlu fasilitas yang bermanfaat dan perlu perkembangan sistem yang optimal dengan melakukan hal hal yang dapat digunakan.

Guna mendukung program tersebut diperlukan dukungannya seluruh elemen masyarakat terutama pemerintahan desa untuk memperdayakan potensi desa masing-masing. Pemberdayaan adalah bagian dari pola pembangunan yang terfokus pada semua aspek yang utama dari manusia dilingkungannya yakni aspek intelektual, aspek material dan fisik. Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pembangunan perlu adanya perhatian serius diperlukan kerja keras semua pihak, seluruh elemen masyarakat

diharapkan memberikan informasi yang akurat tentang pemerintahan desa dan potensi yang dimiliki dimasukkan dalam aplikasi yang akan dibangun.

Sistem yang akan diciptakan oleh penulis berbasis web dan *database* terpusat di server dan aplikasi dapat diakses langsung dari desa masing-masing dengan unsur nama dan *password* yang telah tersedia (Hartono et al., 2010). Pada akhirnya seluruh data akan terkoordinasi baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, guna mengetahui seberapa siap pemerintah desa bertransformasi ke arah *E-government* peneliti mengambil judul "Analisis Kesiapan Desa dalam Menerapkan *E-government*". Diharapkan dalam penelitian ini mengetahui seberapa siap pemerintah Desa Pagerluyung dalam bertransformasi ke arah digital.

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung data dari penulis diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Diansari 2017) Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh United Nation Development Program terkait karakteristik *Good governance*, maka dalam pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan pada pemerintahan terkecil yaitu desa, maka seharusnya dalam pengelolaan ADD memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut.

(Asyikin et al., 2015) Menyatakan bahwa Saat ini desa-desa yang berada di Kalimantan selatan, didalam sistem pelayanan administrasi kependudukan desa masih banyak yang bersifat konvensional. Hal tersebut berimbas kepada perangkat desa maupun penduduk desa, dimana sering terjadi *human error*, serta pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mengarah ke *e-Government* untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam menerapkan *e-Government* dan tata kelola TIK di pedesaan diperlukan suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh sehingga penerapan TIK bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat telah diimplementasikan. Penyusunan *Master Plan* TIK untuk kantor pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan pemerintah kota dalam menentukan kebijakan, rencana strategis, program kerja TIK, pengembangan unit pengelola TIK, manajemen pengguna, pengembangan infrastruktur jaringan, Infrastruktur TIK, Panduan pengelolaan Sistem informasi, sehingga kantor pemerintahan desa dapat memberikan layanan publik yang cepat, tepat sasaran dan melaksanakan visi pemerintah.

Maka dengan adanya data pendukung tersebut peneliti mencoba untuk menganalisis kesiapan desa Pagerluyung dalam bertransformasi ke era digital. , Guna mengetahui seberapa siap pemerintah desa bertransformasi ke arah *E-government* peneliti mengambil judul " Analisis Kesiapan Desa dalam Menerapkan *E-government*". Diharapkan dalam penelitian ini mengetahui seberapa siap pemerintah desa pageruyung dalam bertransformasi ke arah digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa siap pemerintah Desa Pagerluyung untuk menerapkan *E-government* dan seberapa siap masyarakat dalam mengikuti transformasi pelayanan digital. Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa siap pemerintah Desa Pagerluyung untuk menerapkan *E-government*.

Metode

Peneliti mencoba untuk menganalisis kesiapan desa Pagerluyung dalam bertransformasi ke era digital. Guna mengetahui seberapa siap pemerintah desa bertransformasi kearah *E-government* peneliti mengambil judul " Analisis Kesiapan Desa dalam Menerapkan E-government". Diharapkan dalam penelitian ini mengetahui seberapa siap pemerintah Desa Pagerluyung dalam bertransformasi kearah digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa siap pemerintah Desa Pagerluyung untuk menerapkan *E-government* dan seberapa siap masyarakat dalam mengikuti transformasi pelayanan digital. Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa siap pemerintah Desa Pagerluyung untuk menerapkan *E-government*.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan menggunakan teknik purposif. Penulis memilih informan beberapa subjek dari Pemerintah Desa juga beberapa subjek dari masyarakat Desa. Penulis memilih informan tersebut agar indikator siap tidak hanya berada pada satu sisi. Subjek penelitian ini berjumlah 5 orang.

Tabel 1. Data informan

Nama	Usia	Status
Andik Wibowo	43 Tahun	Kepala Desa Pageruyung
Era Rahmawati	37 Tahun	Sekertaris Desa Pageruyung
Nilam	30 Tahun	Warga Desa Pageruyung
Jumiarti	55 Tahun	Warga Desa Pageruyung
Indra	28 Tahun	Warga Desa Pageruyung

Sumber: Data Primer

Data yang diperoleh dari informan selanjutnya dianalisis dengan cara melakukan penyajian data. Menurut (Subadi, 2006) Penyajian data di sini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Lalu dalam Penyajian data tersebut berbentuk *teks naratif*, teks dalam bentuk catatan hasil wawancara dengan informan sebagai informasi terstruktur yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Desa

Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tetang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut (Borolla 2020) Adapun yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala desa, dan juga perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Terkait dengan adanya kewenangan desa maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan.

Dari pendapat diatas dapat penulis bandingkan bahwa pemerintah desa adalah Penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan Pemerintahan desa tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan desa saja, tetapi juga menyelenggarakan urusan pemerintah diatasnya yang terkait dengan desa.

E-government

Menurut (Sosiawan, 2008) *e-government* di definisikan sebagai: Pemerintahan elektronik (juga disebut *e-government*, *digital government*, *online government* atau *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

E-government dapat dikatakan sebagai inovasi atau trobosan baru bagi pemerintah untuk mengembangkan layanan publik agar lebih baik lagi dan untuk membasmi hama-hama birokrasi yang selama ini menjadi penyebab kurangnya administrasi pelayanan publik terhadap masyarakat. Maka dari itu pemerintah memiliki kebijakan dalam memperbaiki kesalahan tersebut dengan *menggunakan E-government* agar terciptanya pemerintah yang bersih dan efektif (Putri & Darmawan 2018). Adapun pengertian inovasi adalah proses beberapa individu dan sebagian kelompok orang mengidentifikasi masalah yang penting dan dapat memecahkan masalah. Bukan hanya solusi tetapi juga menghasilkan dampak terhadap efektifitas, efisien, dan pelayanan publik.

Konsep *e-Government* berkembang didasarkan atas tiga kecenderungan, yaitu:

1. Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non-stop);
2. Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yang sifatnya tradisional/konvensional maupun yang paling moderen, baik yang disediakan

oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya

3. Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud, artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.

Keberhasilan dalam penerapan e-government tidak akan berhasil, jika tidak didukung dengan ketersediaan data yang memadai. Sistem pendataan di desa pagerluyung dikatakan relatif siap dalam mendukung penerepan e-government di pemerintah desa. Hal ini berbanding dengan peneliti (Yamin, 2019) yang menyatakan bahwa dari segi mekanisme komunikasi warga, khususnya terhadap permasalahan yang mengenai usulan atau keluhan warga dapat menyampaikan lewat facebook, whatsapp, dan media sosial lainnya. Data yang dipersiapkan yaitu data kependudukan, keuangan dan data-data yang lain. Data tersebut sudah tersedia dalam masing-masing kantor desa, untuk di desa Pagerluyung sendiri sudah disiapkan oleh masing-masing struktur organisasi desa terutama pada Kasi dan kaur yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari wawancara terhadap lima informan dengan ketentuan informan adalah pemerintah desa pagerluyung dan masyarakat desa pagerluyung ternyata terdapat berbagai pernyataan mengenai kesiapan menerapkan *E-government*. Ternyata dari beberapa subjek menyatakan belum adanya kesiapan mengenai penerapan E-government khususnya bagi masyarakat desa yang mata pencahariannya sebagai petani dan tidak memiliki perangkat digital. Untuk penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dari penjelasan berikut.

Kesiapan Desa Dalam Menerapkan *E-Government* : Pemerintah Desa Pagerluyung

Keberhasilan penerapan e-government harus di dukung dengan ketersediaan data yang baik. Secara umum sistem pencatatan atau manajemen data dari kedua desa dapat dikatakan relatif siap untuk untuk menyokong penerapan *E-government* di pemerintah desa baik data kependudukan, keuangan maupun data yang lain. Data-data tersebut sudah tersedia di masing-masing kantor desa (Subhan & Pratama 2019).

Kapasitas sumber daya manusia yang baik sangat dibutuhkan untuk dapat menerapkan *E-government* dalam sebuah organisasi publik agar dapat sesuai dengan asas manfaat yang diinginkan. Pengelolaan website Desa Pagerluyung hanya dilakukan oleh satu orang. Artinya semua tugas mulai dari pengisian konten dan pengembangan *website* hanya dibebankan terhadap satu orang saja. Sehingga implementasi *E-government* di Desa ini relatif masih kurang baik. Secara latar belakang pendidikan, pengelola juga bukan merupakan ahli dalam bidang informasi dan teknologi. Akibatnya, selama ini pengetahuan dari pengelola dalam mengoperasikan website relatif masih terbatas.

Meskipun pengelolaan data dilakukan hanya satu orang, kondisi website desa Pagerluyung dimana data yang tersedia sudah sangat lengkap misalnya data

kependudukan dan sebagainya. Meskipun website digunakan untuk pendataan dalam menyediakan informasi masih menggunakan media sosial, karena website penyedia informasi tidak bisa diakses.

Kepala Desa Pagerluyung menyebutkan bahwa belum cukup siap menerapkan *E-government* karena sumber daya yang belum memadai. Selain sumber daya manusia keberadaan alat-alat elektronik yang khusus juga belum tersedia. Lagipula dengan sistem *E-government* sebagian besar masyarakat juga belum siap menerapkannya. Masyarakat masih dihantui dengan rasa takut tidak bisa mengakses dan sebagainya. Berbagai alasan warga juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan *E-government*. Seperti yang dituturkannya

“Untuk penerapan e-government mau tidak mau harus segera beranjak kesana, tapi masalah utama adalah sumber daya manusia dan keterimaan masyarakat. Kalau menurut saya, pengadaan barang elektronik ya bisa dicicil. Tapi penerimaan masyarakat dan cara edukasinya yang masih kami pikirkan.”

Sumber: Wawancara 8 Juni 2022

Pendapat tersebut diperkuat dengan indikator konsep e-government diatas bahwa pemerintah sebagai kordinator utama yang artinya bisa menciptakan penyelenggara kebijakan maupun administrasi yang lebih baik dan efesien. Maka sebagai pemimpin pemerintah di desa harus bisa memberikan solusi yang tepat agar bisa diterima dimasyarakat.

Selain itu kepala desa juga mengusahakan adanya *E-government* karena hal ini dirasa sangat diperlukan di masa sekarang ataupun masa nanti. Komitmen kuat seorang pemimpin dalam mewujudkan *e-government* dapat memperkecil hambatan-hambatan dalam implementasinya. Mengingat pemimpin berperan dalam mengarahkan organisasi publik dalam mencapai asas manfaat *e- government*. Pemikiran atau gagasan- gagasan pemimpin juga diperlukan agar dapat memunculkan inovasi-inovasi baru dalam implementasi *e-government* (Subhan & Pratama 2019). Dengan semakin berkembangnya teknologi maka penggunaan teknologi sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan pelayanan di sebuah organisasi menjadi sebuah keharusan. Pada dasarnya Kepala Desa Pagerluyung sadar akan manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan *e- government* di level Pemerintah Desa.

Selain itu, Era yang merupakan sekertaris Desa Pagerulyung juga menyatakan bahwa *e-government* penting dilakukan karena tuntutan akan transparansi publik juga dapat diwujudkan oleh Pemerintah Desa. *E-government* hadir sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat desa terhadap penyelenggara pemerintahan. Menurut era sangat penting dilakukan karena jika desa sudah menerapkan e-government semua sesuatu yang diperlukan warga akan dapat diakses dimanapun warga berada tidak perlu harus datang langsung ke kantor desa dan menunggu antrian. Seperti yang dituturkannya

“Kalau menurut saya e-government ini sangat penting dilakukan ya. Karena transparansi publik juga dapat diwujudkan oleh pemerintah desa. Selain itu, pelayanan desa pun sudah bisa diakses dari rumah tanpa harus antri ke kantor desa.”

Sumber: Wawancara 8 Juni 2022

Penjelasan yang telah dinyatakan oleh kedua subjek tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. dari pihak pemerintah desa sudah memahami seberapa penting penerapan *e-government* ini. Akan tetapi pihaknya sedang melakukan percobaan model edukasi kepada masyarakat Desa Pagerluyung agar juga dapat mengikuti perkembangan yang dibawa dalam penerapan *e-government* di desa tersebut. Hal ini diperkuat dengan (Asyikin, 2015) yang mengatakan bahwa pada kantor desa di Kalimantan masih sangat kekurangan SDM dan infrastruktur yang berhubungan dengan TIK, maka diperlukan tata kelola TIK didesa dan penerapan *e-government* yang matang terhadap perangkat desa agar tidak terjadi human eror dan pemborosan waktu.

Kesiapan Desa Dalam Menerapkan *E-Government* : Masyarakat Desa Pagerluyung

Kebiasaan masyarakat dalam menerima pelayanan publik secara tatap muka memang suli untuk digantikan dengan pelayanan yang berbasis digital. Khususnya pada masyarakat desa yang tergolong dalam kelompok usia lansia. Selain gagap teknologi juga mereka cenderung suka jika memperoleh layanan secara tatap muka. Karena cenderung mendapat informasi yang sejelas-jelasnya dan dapat berinteraksi tanya jawab kepada pihak pemerintah desa.

Kepuasan dalam menerima pelayanan publik secara tatap muka dirasakan oleh nilam. Sebagai warga pagerluyung ia mengaku senang dengan pelayanan tatap muka karena jika terdapat hal yang kurang dimengerti biasanya ia langsung menanyakan kepada pihak pemerintah desa secara langsung. Jika disuruh memilih nilam pasti memilih mempertahankan pelayanan tatap muka karena urusan administrasi apapun yang ada di kelurahan jika datang ke kantor desa akan dilayani sesuai kebutuhan. Nilam beranggapan bahwa jika ini dilakukan secara online ia takut bingung dan berujung salah klik data dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Seperti yang dituturkannya

“Pelayanan tatap muka di kantor desa sudah sangat efektif, kita jika tidak tahu langsung diarahkan oleh pihak pemerintah desa. Kalau harus memilih saya tetap memilih untuk pelayanan tatap muka saja karena lebih efisien, kalau dilakukan secara online saya takut salah pencet dan berakibat fatal nantinya.”

Sumber: Wawancara 9 Juni 2022

Sama halnya dengan Jumiarti, ia mengaku lebih senang jika menerima pelayanan secara tatap muka karena dirasa hal tersebut lebih efektif apalagi bagi usianya. Ia mengaku bahwa dia gagap teknologi dan jika ingin mengurus administrasi di kelurahan harus meminta bantuan dari tetangga karena dirinya tidak memiliki *smartphone* dan jika pelayanan dilakukan secara tatap muka dia bisa berangkat sendiri ke kantor desa tanpa harus merepotkan tetangga.

Seperti yang dikatakan Nilam dan Jumiarti bahwa pelayanan tatap muka dirasa sudah sangat efektif dan efisien karena gagap teknologi ataupun takut akan salah pencet dan dirasa jika pelayanan secara tatap muka akan bisa berhadapan langsung dengan petugas. Hal ini juga dikemukakan oleh (surendro, 2006) dalam penelitiannya

yang mengatakan bahwa kurangnya minat masyarakat terhadap e-government dipengaruhi oleh budaya (*chulture*) yaitu harus adanya partisipasi masyarakat langsung terhadap pemerintahan.

Berbeda dengan Indra, Indra mengaku siap jika pemerintah desa menerapkan *e-government* karena menurut Indra dengan adanya penerapan *e-government* dia bisa mengakses data apapun yang dibutuhkannya langsung diakses dimanapun ia berada. Apalagi latar belakang pekerjaan Indra yang berada di luar kota jadi ia beranggapan bahwa penerapan e-government sangat memudahkan dia. Seperti yang dituturkannya

“Menurut saya jika pelaksanaan e-government diterapkan sangat memudahkan kami-kami yang bekerja diluar kota. Karena saya tidak perlu pulang dulu ke desa untuk mendapatkan surat-surat yang kami butuhkan.”

Sumber: Wawancara 9 Juni 2022

Pendapat tersebut dapat diperkuat dengan adanya indikator dalam konsep *e-government* yang telah dipaparkan di hasil dan pembahasan yaitu masyarakat boleh dan berhak memilih mekanisme interaksi dengan berbagai akses yang telah disediakan pemerintah. Maka sebagai masyarakat Indra berhak memilih untuk berinteraksi terhadap pemerintah dengan melakukan pengaksesan secara online.

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh ketiga subjek tersebut menunjukkan indikator kesiapan masyarakat terhadap penerapan *e-government* di Desa Pagerluyung. Ternyata dari hal tersebut kita mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kesiapan masyarakat dalam penerapan *e-government*. Masyarakat cenderung masih takut atau belum siap dalam penerapan e-government karena berbagai alasan. Alasan pertama yaitu lebih senang dengan pelayanan tatap muka karena lebih efisien. Efisien yang dimaksud adalah jika terdapat suatu hal yang tidak diketahui bisa langsung ditanyakan ke pihak terkait. Juga pelayanan tatap muka masih sangat diperlukan untuk kategori umur lansia yang gagap teknologi. Selain itu juga terdapat masyarakat yang sudah siap dengan adanya e-government di desa Pagerluyung seperti yang dipaparkan oleh informan Indra, karena dapat memudahkannya dalam mengurus surat-surat bagi orang yang bekerja diluar kota.

Dalam hal ini dapat dianalisis bahwa kesiapan desa dalam *e-government* akan berjalan dengan efisien jika aparat desa memiliki kualitas yang baik dengan melakukan pelatihan dan bimbingan terhadap aparat dan membuat pelatihan secara berkala, selain itu untuk meningkatkan kualitas yang baik tidak hanya aparat yang harus memiliki kualitas yang tepat diperlukannya pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa selaku pimpinan desa agar aparat bisa bekerja dengan benar dalam melayani masyarakat. Administrasi desa juga diperlukan pengawasan untuk bisa menyebarkan informasi yang ada di desa (Leonard, 2020). Untuk melakukan pengawasan dapat dilakukan oleh kepala desa dibantu BPD (badan permusyawaratan desa sehingga adanya pengawasan diharapkan bisa menyatukan visi dan misi untuk membangun desa yang maju dan makmur, hal ini sejalan yang dikatakan oleh (Purwanto, 2022) yaitu pengembangan kualitas SDM sangat dibutuhkan sebab berkaitan dengan penggunaan dana desa dan sumber daya lainnya yang efektif dan tepat sasaran dalam perencanaan serta pengembangan desa. Tetapi juga masyarakat harus mendapatkan perkembangan informasi yang baik agar bisa diterima

masyarakat luas seperti diperlukannya sosialisasi tentang penggunaan dan perkembangan e-government, hal ini diperkuat oleh (Ahmad et al., 2022) yaitu strategi sosialisasi langkah awal dan menjadi penentu dalam menjalankan sosialisasi *e-government*. Sosialisasi dapat melibatkan pemuda pemudi yang pada yang diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menggunakan *e-government* para pemuda tersebut bisa mengajarkan kepada orang tuanya agar bisa mengoperasikan internet dan pelayanan publik secara online. Untuk menyebarkan dan menguatkan strategi sosialisasi pemerintah dapat memasang spanduk atau pamflet tentang tata cara menggunakan *e-government*. Menurut Menkominfo, dalam kampanye sosialisasi publik diperlukan banyak strategi dalam bentuk kampanye pemerintahan (Post, 2022). Terakhir sangat diperlukannya evaluasi dan pengawasan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan hasil dari evaluasi bisa digunakan sebagai indikator rencana selanjutnya untuk mengembangkan e government. keberhasilan evaluasi dilakukan tidak hanya dilihat dari statistik atau angka-angka tetapi dampaknya harus bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung (Rohendi, 2022), dengan adanya evaluasi diharapkan dapat menjalankan pelayanan publik dengan efektif agar terciptanya pelayanan publik yang berintergritas.

Kesimpulan dan Saran

Simpulan memuat jawaban atas hipotesis, rumusan atau fokus penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Saran mengacu pada hasil penelitian yang berupa praksis – praksis dan disebutkan untuk *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dan dalam penerapannya pemerintah desa maupun masyarakat banyak yang belum siap beranjak kearah e-government. Ternyata dari beberapa subjek menyatakan belum adanya kesiapan mengenai penerapan E-government khususnya bagi masyarakat desa yang mata pencahariannya sebagai petani dan tidak memiliki perangkat digital. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pandangan kesiapan dari penerapan e-government di Desa Pagerluyung ini. Dari pihak pemerintah desa sudah memahami seberapa penting penerapan *e-government* ini. Akan tetapi pihaknya sedang melakukan percobaan model edukasi kepada masyarakat Desa Pagerluyung agar juga dapat mengikuti perkembangan yang dibawa dalam penerapan *e-government* di desa. Sementara Masyarakat cenderung masih takut atau belum siap dalam penerapan e-government karena berbagai alasan. Alasan pertama yaitu lebih senang dengan pelayanan tatap muka karena lebih efisien. Efisien yang dimaksud adalah jika terdapat suatu hal yang tidak diketahui bisa langsung ditanyakan ke pihak terkait. Juga pelayanan tatap muka masih sangat diperlukan untuk kategori umur lansia yang gagap teknologi. Selain itu juga terdapat masyarakat yang sudah siap dengan adanya *e-government* di Desa Pagerluyung. Terdapat pandangan juga bahwa jika melakukan pelayanan secara online dinilai akan mengurangi rasa sosialisali dan mengurangi rasa tali silaturahmi pemerintah dengan masyarakat.

Adapun saran-saran dari penelitian tersebut yaitu Dibutuhkannya studi kelayakan lebih lanjut untuk menguji kelayakan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi dalam inovasi *e-government* yang telah dilakukan. Serta diperlukan rancangan proses perencanaan dan evaluasi untuk memastikan pola ini agar berjalan sesuai yang diinginkan pemerintah. Perlu adanya dilakukan evaluasi berkala terhadap dampak keberhasilan pola *e-government* ini yang terpenting dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hendaknya dilakukan simulasi atau pelatihan terhadap birokrat desa agar bisa menggunakan dan menjalankan komputer dengan baik. Dan juga sebaiknya pemerintah desa menggunakan dan memanfaatkan teknologi saat ini untuk mengakses informasi yang terkait tentang data-data kependudukan atau bisa membuat *website* satu atap untuk segala informasi yang ada.

Daftar Pustaka

- Asyikin, Arifin Noor, Rahimi Fitri, and Agus Setiyo Budi N. 2015. "Pengukuran Tingkat Kesiapan Kantor Pemerintah Desa Dalam Penerapan Masterplan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Perkantoran Desa Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1." *Jurnal Poros Teknik* 7(2):61-67.
- Borolla, julio kaiser. 2020. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Dalam Kelompok Tani."
- Diansari, Rani Eka. 2017. "Analisis kesiapan desa dalam implementasi penerapan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi Pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)." 20(1):41-55.
- fauzan. (2022, januari 22). *satu tahun kepemimpinan bupati mojokerto luncurkan 3 aplikasi digital*. Retrieved januari 12, 2022, from <https://m.liputan6.com/jatim/read/4866435/satu-tahun-kepemimpinan-bupati-mojokerto-luncurkan-3-aplikasi-digital>.
- Hartono, Dwiwarso Utomo, and Edy Mulyanto. 2010. "Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis WEB." *Jurnal Teknologi Informasi* 6(1):9-21.
- Muhammad yamin, a. b.-s. (2019). analisis open government dan e-government di indonesia berdasarkan kerangka kerja sdgs:studi kasus desa melung, kabupaten banyumas. *jurnal hubungan internasional*, <https://doi.org/10.18196/hi.72137>.
- Napitupulu, Darmawan Baginda. 2016. "Kualitas layanan e-government (sebuah analisa di pemkot x dengan pendekatan e-govqual dan ipa)." *jurnal penelitian pos dan informatika* 6(2):153. doi: 10.17933/jppi.2016.060203.
- Peneliti, t. (2021). *kajian kesiapan (e-readiness) kecamatan dalam penerapan e-government*. semarang: lppm universitas negeri semarang
- Pengelolaan Leonard Leonard, H. M. (2020). Mengupayakan peningkatan kualitas aparat desa dalam administrasi pemerintah di desa malimbong kecamatan sesenapadang kabupaten mamasa. *journal peqguruang*.

- Post, S. (2022). *Kominfo tingkatkan program sosialisasi penurunan stunting*.
- Prihatin, m. (2021, april 10, sabtu). *bupati luncurkan 3 aplikasi sekaligus*. retrieved april 9, 2021, from <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/bupati-mojokerto-luncurkan-3-aplikasi-sekaligus>.
- purwanto. (2022). *Capacity building pemdes gedongarum menuju profesionalisme aparatur desa*.
- Putri, Nur Aslamaturrahmah Dwi, and Eki Darmawan. 2018. "E-Readiness provinsi kepulauan riau dalam penerapan e-government (studi terhadap kepri smart province)." *jurnal ilmu pemerintahan*, Vol. 3(1):173–92.
- Rohendi, E. (2022). *Pimpin rapat evaluasi kinerja perangkat daerah, pak Uu: fokus hasil nyata*.
- Sosiawan, Edwi Arief. 2008. "Tantangan dan hambatan dalam implementasi e-government di indonesia." 2008(semnasIF):99–108
- Subadi, Tjipto. 2006. *Metode penelitian kualitatif*. edited by erlina farida hidayati. surakarta: muhammadiyah university press.
- Subhan, Subhan, and Arif Budy Pratama. 2019. "Kesiapan desa dalam penerapan e-government (studi perbandingan di desa semaya dan desa pegirangan kabupaten pemalang)." *Jurnal administrasi negara* 7(2):161–75. doi: 10.30656/sawala.v7i2.1542.
- Surendro, B. s. (2006). kajian terhadap un global e-government readiness report 2005 dalam upaya meningkatkan e-government radiens indonesia. *seminar nasional aplikasi informasi*.
- Sosiawan, Edwi Arief. 2008. "Tantangan dan hambatan dalam implementasi e-goverment di indonesia." 2008(semnasIF):99–108.
- Subadi, Tjipto. 2006. *Metode penelitian kualitatif*. edited by erlina farida hidayati. surakarta: muhammadiyah university press.
- Watrianthos, Ronal, A. D. E. Parlaungan Nasution, and Muhammad Syaifullah. 2017. "Model e-goverment pemerintahan desa." 17(1):53–60.
- Zakly Hanafi Ahmad*, M. A. (2022). Analisis upaya strategis dalam memaksimalkan penerapan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), Oktober 2022, 1432-1437. Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)." 20(1):41–55.